

**PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL,
WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD***

**(Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Dan Kota
Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

SITI ZULFA

NIM : 4319150

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL,
WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD***

**(Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Dan Kota
Tegal)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

SITI ZULFA

NIM : 4319150

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Zulfa

NIM : 4319150

Judul Skripsi : Pengaruh *Whistleblowing System*, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Dan Kota Tegal)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2023

Yang menyatakan



Siti Zulfa

NOTA PEMBIMBING

Dr. AM. M. Hafidz M, M.Ag

Jl. Asri Raya No.3, Bundawar, Denasri Kulon, Batang, Jawa Tengah 51216

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Siti Zulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **Siti Zulfa**

NIM : **4319150**

Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Auditor Internal, *Whistleblowing System*, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Dan KotaTegal)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 26 Mei 2023
Pembimbing,


Dr. AM. M. Hafidz M, M.Ag
NIP. 197806162003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

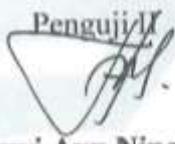
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : Siti Zulfa
NIM : 4319150
Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Auditor Internal, Whistleblowing System, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Dan Kota Tegal)**
Dosen Pembimbing : **Dr. AM. M. Hafidz M, M.Ag**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,


Ade Gunawan, M.M
NIP.198104252015031002


Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si
NIP. 199101092020122016

Pekalongan, 1 Agustus 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

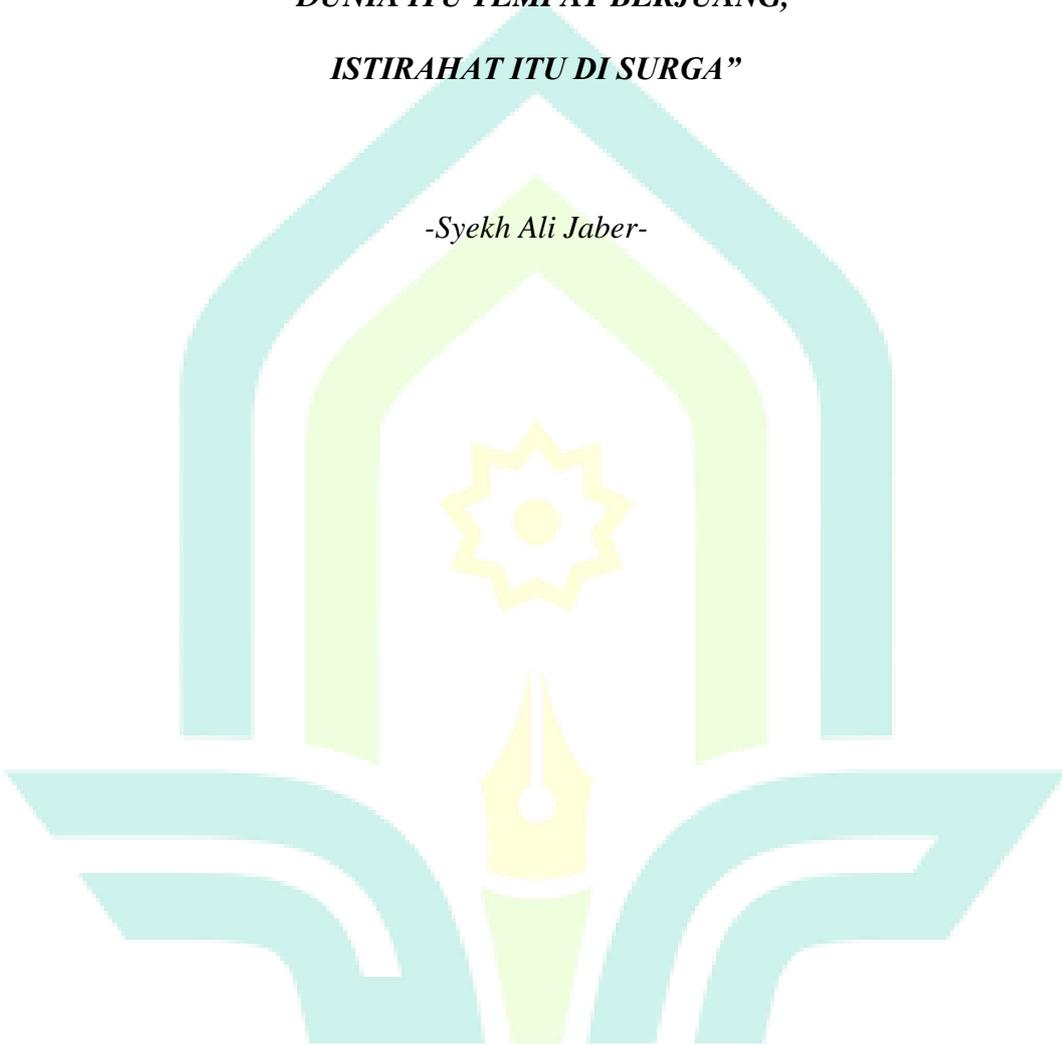



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP.197502201999032001

MOTTO

***“DUNIA ITU TEMPAT BERJUANG,
ISTIRAHAT ITU DI SURGA”***

-Syekh Ali Jaber-



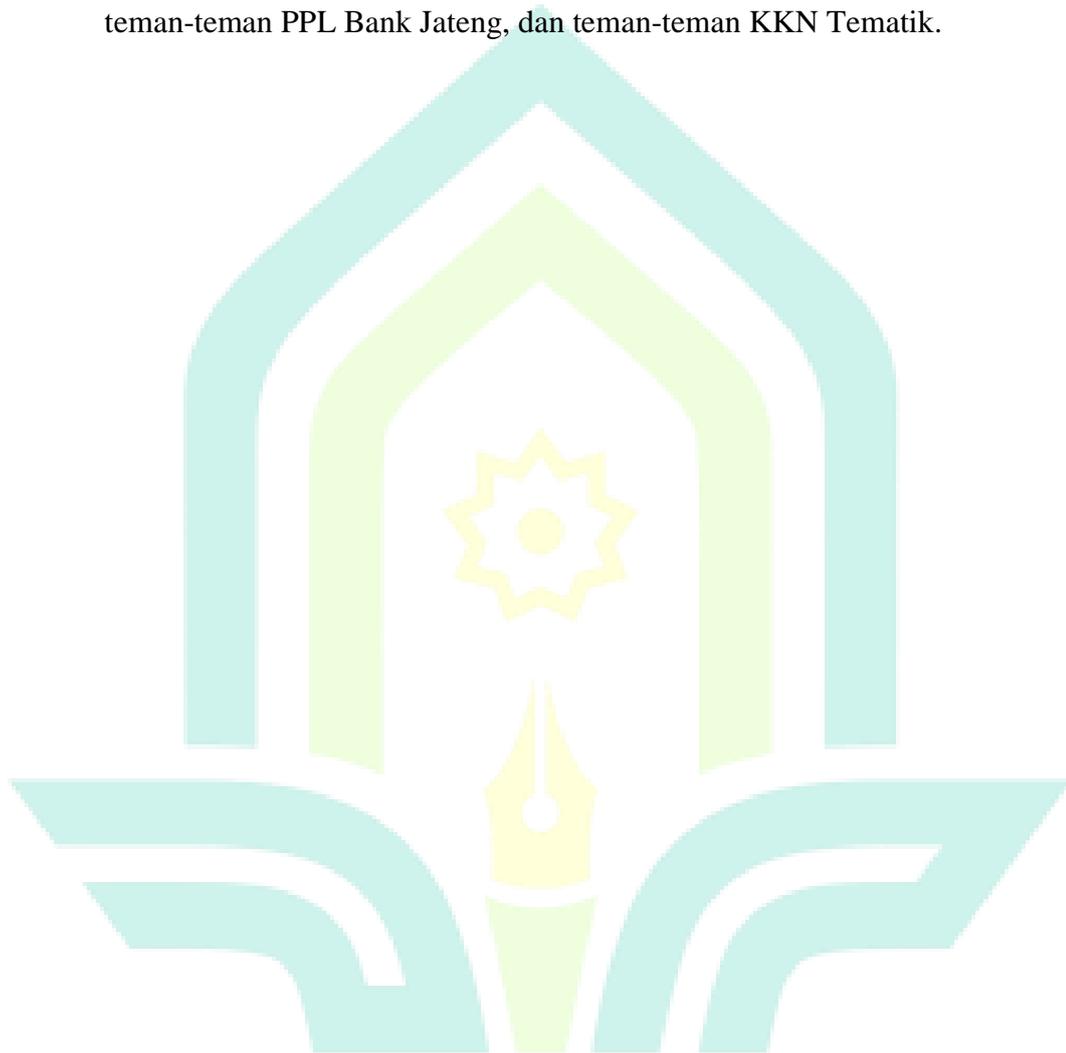
PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini

beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Mulyanah dan Bapak Sobirin, yang selalu menjadi *support system* bagi penulis.
2. Guru sekaligus orang tua, Abah Yai Sabilal Rosyad dan Ibu Nyai Nur Laela Fitriya.
3. Para Asatid dan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Qutub Wonopringgo.
4. Adikku tersayang, Ahsani Taqwim.
5. Keluarga besar penulis yang ada di Bogor.
6. Almameter penulis, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. AM. M. Hafidz M, M.Ag yang berkenan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Dosen Pembimbing Akademik, Drajat Stiawan, M.Si yang berkenan membimbing penulis sebagai mahasiswi.
9. Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadikan instansinya sebagai bagian dari tugas akhir ini.

10. Almameter penulis, Pondok Pesantren Al-Qutub Wonopringgo yang menjadi tempat *tholabul ilmi* penulis dari awal perkuliahan.
11. Kepada sahabat penulis, Indah Wulandari Wilujeng, Eka Lutfiana, Dina Syahara yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2019, teman-teman PPL Bank Jateng, dan teman-teman KKN Tematik.



ABSTRAK

SITI ZULFA. Pengaruh *Whistleblowing System*, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Dan Kota Tegal)

Fraud merupakan tindakan kecurangan untuk keuntungan pribadi, dan merugikan pihak lain. Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjelaskan bahwa Indonesia berada di urutan ke-96 dari 180 negara di dunia, dengan perolehan skor yakni 38. Kecurangan yang ada di Indonesia, terutama pada sektor pemerintahan yang menduduki posisi kedua setelah kecurangan yang terjadi pada sektor industry keuangan dan perbankan, yakni dengan persentase sebesar 39,9%. Pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung perwujudan tujuan organisasi. Nilai maturitas SPIP di Kabupaten Brebes yang meningkat, masih belum mampu dalam memberantas tindak kecurangan. Pemerintahan dengan kategori sangat baik yang bebas dari tindakan korupsi, juga didapatkan oleh Kota Tegal. namun, kategori yang didapat tidak serta merta membuktikan bahwa pemerintahan benar-benar terbebas dari kasus kecurangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi auditor internal, *whistleblowing*, dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda yang diolah dengan software IBM SPSS 26. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survey melalui kuesioner, serta menggunakan teknik *non probability sampling* secara *purposive sampling* dengan kriteria pegawai fungsional, sehingga didapat 79 sampel yang terdiri dari auditor internal dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.

Ditemukan hasil bahwa kompetensi auditor, *whistleblowing system*, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* secara signifikan, dan terdapat pengaruh bersama-sama kompetensi auditor, *whistleblowing system*, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan *fraud*. Auditor yang berkompentensi, serta *whistleblowing system* dan sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan secara optimal, mampu meminimalisir tindakan kecurangan (*fraud*).

Kata Kunci: Kompetensi Auditor Internal, *Whistleblowing System*, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pencegahan *Fraud*

ABSTRACT

SITI ZULFA. *Influence of the whistle system, application of the government's internal control system and the internal auditors' competence of fraud prevention (study in district inspector brebes and the town tegal district)*

Fraud constitutes an act of fraud for personal gain, and hurts the other party. The survey on corruption perceptions index (ipk) explained that Indonesia is 96th in line to 180 countries in the world, with a score of 38. In the second quarter of 2007, the company's net profit in the first half of 2007 fell to rp8.3 trillion from rp7.9 trillion in the same period last year. Internal control is essential to supporting the organizational goals. Spip value in increasing brebes county, still inadequate to combat fraud. An excellent category of government free from corruption, also obtained by the city of tegal. However, the earned category does not prove that governments are completely free of cases of fraud.

The purpose of this study is to test the impact of the competence of internal auditors, whistleblowing, and application of the internal control system on fraud prevention. The research is quantitative by using linear berganda regression treated with IBM SPSS software 26. The data used in the study is the primary data used in data-collection techniques using survey methods through questionnaire, as well as by non-sampling techniques more efficiently sampling with functional worker criteria, resulting in 79 samples made up of internal auditors and control administrators of both brebes and tegal districts.

Results have been found that the auditor competence, the whistleblowing system, the application of the government's internal control system affected the fraud prevention significantly, and there are the joint effects of the auditors' competence, the whistle system, the application of the government's internal control system on fraud prevention. Competent auditors, as well as the optimally implemented whistle systems and internal control systems of governments, are able to minimize fraud.

Key Word : Internal auditory competencies, whistleblowing systems, application of government internal control systems, fraud prevention

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada :

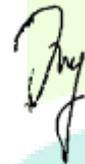
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Sinta Dewi Rismawati, S.H, M.H, selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Tamamudin, M.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen Penguji I pada sidang skripsi penulis.
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA, CA, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dr. AM. M. Hafidz M, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang berkenan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Drajat Stiawan, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
8. Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si, selaku Dosen Penguji II pada sidang skripsi penulis.

9. Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dan Inspektorat Daerah Kota Tegal yang telah bersedia dan membantu penulis dalam memperoleh data.
10. Kedua orang tua penulis, Ibu Mulyanah dan Bapak Sobirin yang selalu menjadi *support system* penulis, dimanapun dan sampai kapanpun.
11. Dr. K.H Sabilal Rosyad M.SI dan Nyai Nur Laela Fitriya, S.Pd, yang menjadi guru sekaligus orang tua penulis.
12. Sahabat-sahabat yang telah bersedia berjuang bersama, telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga kebaikan semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sumber bacaan maupun referensi serta menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 18 Juli 2023

Penulis,



Siti Zulfa

DAFTAR ISI

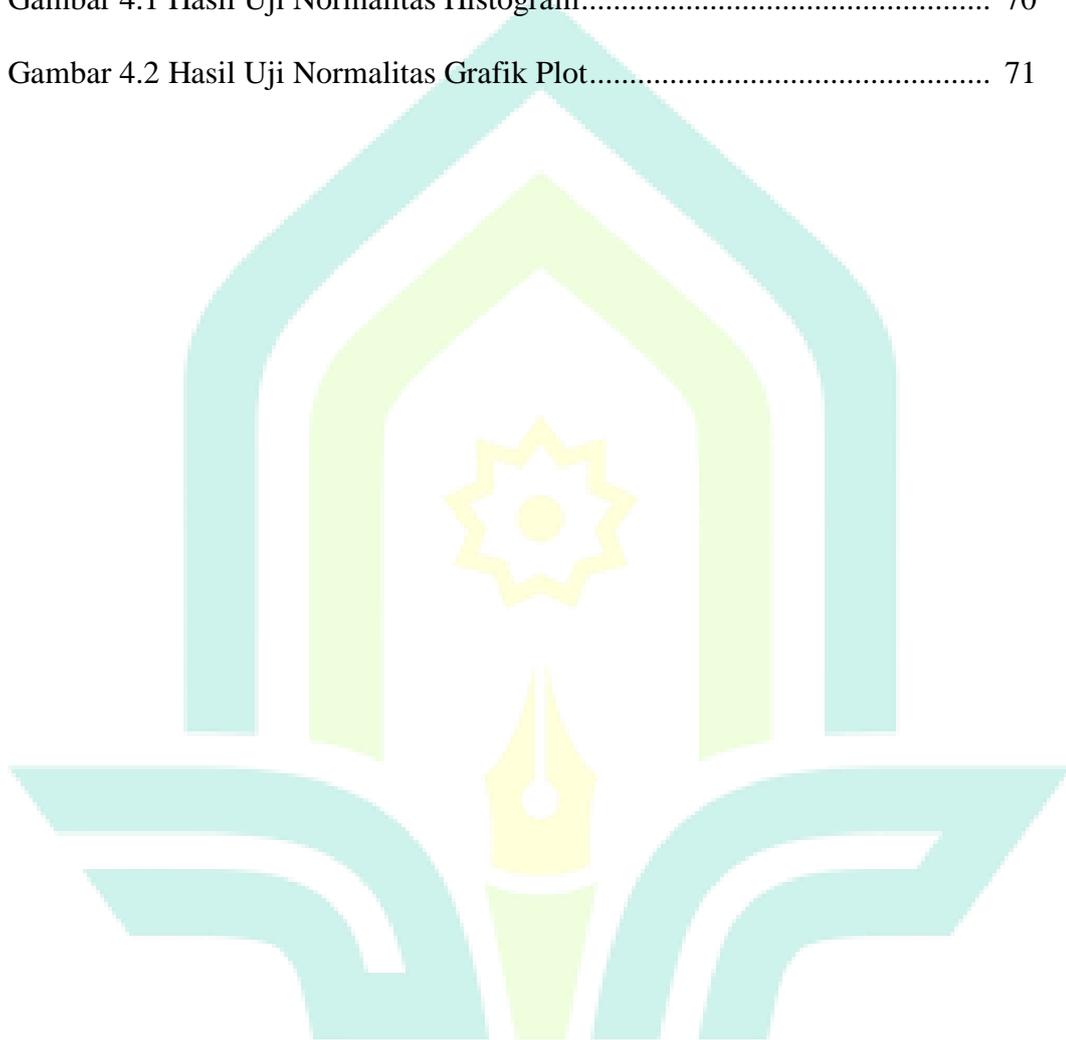
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB V	15
PENUTUP	15
A. Simpulan	15
B. Keterbatasan Penelitian	89
C. Saran	90
D. Implikasi	91
1. Implikasi Teoritis	91
2. Implikasi Praktis.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Pustaka	32
Tabel 3.1 Populasi Penelitian.....	48
Tabel 3.2 Sampel Kabupaten Brebes	49
Tabel 3.3 Sampel Kota Tegal.....	49
Tabel 3.4 Sampel Akhir	49
Tabel 3.5 Definisi Operasional	51
Tabel 3.6 Skor Skala Likert	54
Tabel 4.1 Jenis Kelamin.....	64
Tabel 4.2 Usia	64
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir.....	65
Tabel 4.4 Jabatan.....	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	72
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	73
Tabel 4.11 Hasil Uji T-Test	76
Tabel 4.12 Hasil Uji F Simultan	78
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	79

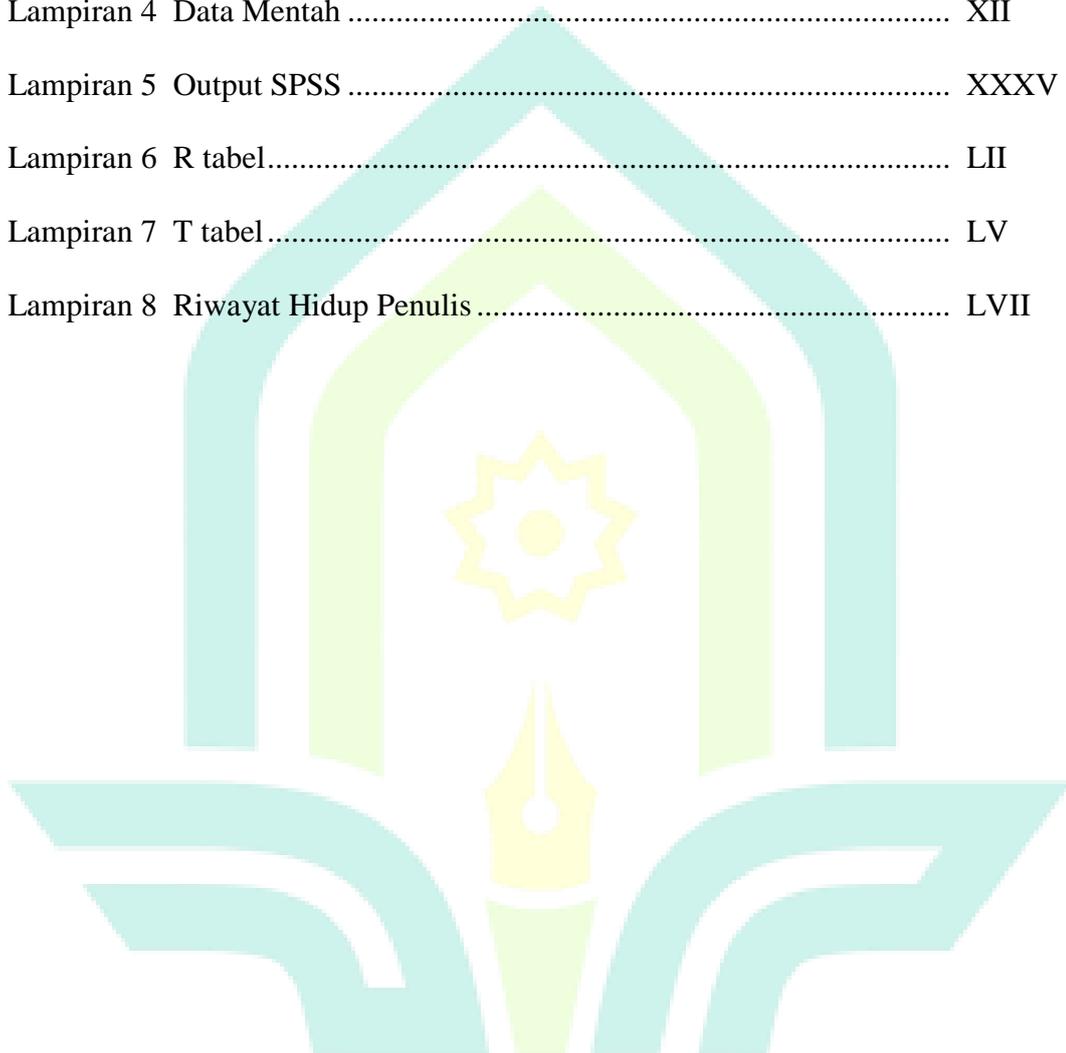
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Konsep <i>Fraud Hexagon</i>	15
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	70
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Plot.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	I
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	II
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian.....	IV
Lampiran 4 Data Mentah	XII
Lampiran 5 Output SPSS	XXXV
Lampiran 6 R tabel.....	LII
Lampiran 7 T tabel.....	LV
Lampiran 8 Riwayat Hidup Penulis	LVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang merugikan banyak pihak. *Fraud* sering diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan melalui sumber daya atau aset organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. *Association of Certified Fraud Examiners* (2018). SAS No.99 mendefinisikan tindakan kecurangan yakni sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan adanya kesadaran dalam pembuatan salah saji material pada sebuah laporan keuangan (Saputra et al., 2019).

Survei ACFE (2019) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) tipologi kecurangan berdasarkan perbuatan, yakni perbuatan kecurangan yang dilakukan dalam laporan keuangan (*Fraudulent Statement*), aset yang disalahgunakan (*Asset Misappropriation*), dan korupsi (*Corruption*). Survey ACFE (2019) menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindak kecurangan yang kerap terjadi. Korupsi merupakan tindakan kecurangan dengan kerugian paling besar di Indonesia, dengan persentase sebesar 64,4% dibandingkan dengan tindakan penyalahgunaan aset /kekayaan yang memiliki persentase sebesar 28,9%, serta lebih besar dari kasus penyalahgunaan laporan keuangan yang hanya berada di angka 6,7%.

Kecurangan (*fraud*) telah ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, yakni pada surat Al-Muthaffifin [83: 1-3]:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا يُخْسِرُونَ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) ! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya), apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”

Fraud atau kecurangan tidak hanya terjadi pada sektor swasta, Sektor public juga berpotensi dalam perlakuan tindakan kecurangan dan tidak menutup kemungkinan bagi pegawai sektor publik untuk melakukan kecurangan. *Association of Certified Fraud Examiners* (2019) menjelaskan bahwa tindakan *fraud* (kecurangan) yang ada pada sektor pemerintahan berada pada posisi kedua setelah Industri keuangan dan perbankan, yakni dengan persentase sebesar 39,9%. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penanganan kasus korupsi tahun 2004 – 2018 yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan profesi/jabatan, kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan petinggi organisasi yakni mencapai 60% dari jumlah keseluruhan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK (Asmara, 2021).

Suyatmiko (2021) menjelaskan bahwa upaya anti-korupsi di Indonesia masih mengalami kemajuan yang lamban, dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi, pengadaannya masih belum efektif. Sama halnya dengan survey yang dilakukan oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau “*Corruption Perceptions Index*” (CPI) terhadap 180

negara di dunia. Pada tahun 2021, Indonesia menduduki rangking 96 dengan perolehan skor sebesar 38 (KPK, 2022). Skor tersebut naik satu poin dari skor tahun 2020, yakni dengan skor 37/100 dan menduduki peringkat peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei (Suyatmiko, 2021).

Pengawasan di Indonesia dalam hal urusan pemerintahan, diperankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Provinsi/Daerah, yang mana terdapat suatu aparat yang bertugas dalam pengawasan intern pemerintah, yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (RI, 2008). APIP dalam hal melaksanakan tugasnya, tidak hanya melakukan pengauditan, namun APIP juga berperan dalam mereviu, memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan kegiatan pengawasan lain yang dalam hal ini berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi. Peran yang ada, telah tersusun rapi dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/05/M.PAN/03/2008. Tentu peran APIP perlu diimbangi dengan sikap integritas dan objektivitas seorang APIP, sikap menjaga setiap rahasia/privasi, sikap yang selalu mengutamakan kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional APIP, yang mana enam sikap tersebut menjadi kode etik APIP yang dikenal dengan enam prinsip etika (Asmara, 2021).

Seorang auditor/APIP yang bertugas dalam sebuah Inspektorat harus mempunyai kompetensi serta pengalaman yang memadai ataupun keahlian yang sesuai dalam melaksanakan perannya sebagai seorang pengawas pada sektor publik. Kompetensi tersebut berupa daya mampu

auditor untuk menerapkan hal yang telah diraihnya guna pelaksanaan pengauditan, yakni berupa pengetahuan mengenai audit serta pengalaman sebagai penunjang pelaksanaan audit (Rahmanda & Yuniarti, 2019). Secara mendasar, APIP memiliki tiga peran yakni sebagai pengawas dalam laporan keuangan, sebagai pengawas kinerja, dan pengawasan dengan tujuan tertentu. APIP tidak hanya diharuskan memiliki keahlian mengenai perlakuan audit, APIP juga harus memahami peraturan-peraturan mengenai standar audit, mengenai kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit, serta harus memiliki pengetahuan mengenai lingkungan pemerintahan (Menteri Negara, 2008).

Perhatian terhadap kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki seseorang setidaknya perlu untuk dilakukan, karena apabila seseorang tidak memiliki kompetensi yang seharusnya diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan, maka dapat memberikan dampak tidak baik pada kinerja yang dilakukan (Gede et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Auditor Internal menjalankan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang mana fungsinya yakni sebagai pemberi keyakinan (*assurance activities*), dan konsultasi (*consulting activities*) (Irafah et al., 2020).

Nurfadillah (2022) mengungkapkan bahwa peran inspektorat dalam pencegahan *fraud* yakni berperan dalam pengembangan proses pengawasan (*oversight process*). Dimana, dalam memberikan pengawasan, auditor internal memerlukan dukungan dari berbagai layanan, yakni salah satunya dengan layanan penyampaian pengaduan atau sering dikenal dengan *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan suatu wadah bagi internal organisasi yang berguna sebagai sarana pengaduan dan pelaporan tindakan kecurangan (Wahyuni & Nova, 2018). Pengoptimalan terhadap sistem pengaduan (*whistleblowing system*) serta penguatan pada sistem pengendalian dan pengawasan internal merupakan salah satu bentuk upaya dari pencegahan kecurangan (*fraud*). Pengoptimalan serta penguatan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (2016) yang menjelaskan mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Whistleblowing system adalah sarana bagi seseorang yang memiliki antusias untuk melaporkan kecurangan ataupun tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam organisasi (Akhyar et al., 2022). Sistem ini sangat membutuhkan seluruh elemen organisasi untuk terlibat dalam proses pengungkapan serta pelaporan. Implementasi yang efektif, transparan dan akuntabel menjadi pendorong sekaligus dapat meningkatkan partisipasi pekerja serta masyarakat dalam pelaporan dugaan tindakan kecurangan yang diketahuinya (Wahyuni & Nova, 2018).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kabupaten Brebes pada tahun 2022, nilai maturitas SPIP meningkat dari semula bernilai 2,551 menjadi 3. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya realisasi jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP. Terdapat 13 Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP tahun 2021, dan tahun 2022 meningkat menjadi 15 Perangkat Daerah. Namun dari peningkatan nilai maturitas SPIP yang telah dicapai, bukan berarti kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Brebes dapat benar-benar teratasi.

Tahun 2022, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Brebes dilaporkan atas dugaan kasus korupsi *mark up* harga buku referensi SMP. Harga buku yang ditawarkan oleh dinas terdapat selisih Rp2,65 juta dengan harga buku yang dijual pada *marketplace* / toko *online*. Selain itu, intimidasi dan pemindahan tugas akan dilakukan kepada para Kepala SMP yang tidak mengikuti arahan. Selanjutnya, Dugaan lain juga dilaporkan atas tindakan pengalihan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dindikpora yang sekarang telah menjabat sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Brebes. Tindakan tersebut dilakukan dengan pemindahan DAK dari pemerintah kepada sekolah yang tidak terdaftar sebagai penerima DAK (detikJateng, 2022).

Sama halnya dengan Kabupaten Brebes, tahun 2021 pemerintahan yang bebas dari korupsi pada Kota Tegal mendapatkan kategori sangat baik dengan capaian 106,69% (Kota Tegal, 2021). Namun, di tahun yang

sama, terdapat dugaan kasus korupsi dana penanggulangan *Covid-19* yang sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan dan belum mencapai titik temu. Dana penanggulangan *Covid-19* berumber dari anggaran CSR PDAM Kota Tegal, yang hingga saat ini masih belum dapat ditentukan siapa saja pihak yang terlibat dan belum diketahui secara pasti seberapa banyak uang Negara yang dirugikan. (DPRD Kota Tegal, 2022).

Menurut Wicaksono (2019) adanya tindakan *fraud* dalam proses pemeriksaan dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yakni tekanan yang ada karena kebutuhan atau gaya hidup, lemahnya sistem pengendalian internal yang memunculkan kesempatan dalam melakukan tindakan kecurangan, serta rasionalisasi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian yang penyelenggaraanya dilakukan pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara menyeluruh, dengan tujuan agar efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan dapat tercapai sesuai tujuan serta taat terhadap peraturan undang-undang (RI, 2008).

Tindakan kecurangan terjadi tidak hanya karena lemahnya tata kelola pemerintahan. Namun, kelemahan pada sistem pengendalian internal juga menjadi faktor pemicu terjadinya perbuatan *fraud* (Ladewi et al., 2020). Pengawasan pada sistem pengendalian intern yang ada pada sektor pemerintahan merupakan peran dari inspektorat. Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan secara optimal,

mampu mendukung pencegahan kecurangan. SPIP yang diterapkan dengan baik mampu mencegah ataupun meminimalisir terjadinya perbuatan *fraud* (Francesco & Hastuti, 2022). Penelitian yang telah dilakukan oleh Azizah (2022), memberikan hasil bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun dalam penelitian Akhyaar, dkk (2022) sistem pengendalian internal tidak memiliki efek terhadap pencegahan *fraud*. Selanjutnya, dapat diketahui pada penelitian yang dilakukan oleh Mersa dan Malini (2021) bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara *whistleblowing system* dengan pencegahan kecurangan. Namun, Inawati dan Sabila (2021) dalam penelitiannya memberikan hasil yang berbeda, bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dari penelitian terdahulu telah dapat diketahui bahwa terdapat suatu hasil yang kurang konsisten antara pengaruh sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dari berbagai fenomena yang ada maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL, WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

- 1) Apakah kompetensi auditor internal memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal?
- 2) Apakah *whistleblowing system* memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal?
- 3) Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal?
- 4) Apakah kompetensi auditor internal, *whistleblowing system*, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal?

C. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yakni :

1. Menemukan bukti mengenai pengaruh dari kompetensi auditor internal terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.
2. Menemukan bukti mengenai pengaruh dari *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.

3. Menemukan bukti mengenai pengaruh dari penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.
4. Menemukan bukti mengenai pengaruh dari kompetensi auditor internal, *whistleblowing system*, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, penulis berharap ada kebermanfaatn bagi berbagai pihak dari adanya penelitian ini, manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi positif tentu diharapkan dari adanya penelitian ini terhadap sumber pengetahuan, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi *fraud*, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peranan kompetensi auditor internal, *whistleblowing system*, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan kecurangan pada sektor pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Harapannya, penelitian ini menjadi salah satu dari sekian banyak bahan literasi dan juga sekaligus dapat menjadi sumber acuan bagi mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,

guna mendukung pengembangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan pemerintah daerah mengenai upaya pencegahan kecurangan agar tercipta pemerintah daerah yang bersih serta terbebas dari tindakan kecurangan.

a. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan ataupun sumber referensi serta menjadi suatu pengembangan bagi riset selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini dideskripsikan melalui 5 bab, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, sehingga dapat mempermudah peneliti serta pihak yang menggunakan penelitian ini memahami penelitian yang dilaksanakan. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merinci konteks topic penelitian, perumusan topic penelitian, tujuan serta manfaat penelitian. Hal tersebut akan dibahas pada awal skripsi dengan tujuan agar dapat diketahui latar belakang peneliti melakukan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab ini melingkupi mengenai kerangka teori yang dipergunakan untuk mengetahui teori apa yang ditinjau dalam penelitian ini. Landasan dalam sebuah teori, telaah pustaka, rerangka berpikir, serta hipotesis juga dibahas dalam bab ini.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian dibahas pada bab III, yang mana akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, dimana penelitian dilaksanakan, pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, variabel yang dipergunakan, pemilihan lokasi, definisi tiap variabel yang diteliti, keseluruhan dari populasi serta sampel yang digunakan, sumber data, serta pengujian-pengujian statistic yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan

Hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari bab ini. Hasil analisis data yang telah diolah dan didapatkan melalui metode yang telah dideskripsikan, serta penjabaran mengenai hasil dari pengujian analisis data juga dimuat dalam bab ini.

Bab V Penutup

Bab penutup berisi uraian kesimpulan serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya juga dimuat pada bab ini. Bagian ini ditempatkan pada bagian akhir skripsi karena melingkupi rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompetensi auditor internal memiliki efek terhadap pencegahan *fraud*, yang mana efek yang dihasilkan yakni berupa efek positif. Hasil riset ini memberikan dukungan terhadap penelitian dari Lianto (2021), dimana riset yang dihasilkan menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
2. *Whistleblowing system* memberikan efek terhadap pencegahan *fraud*, yang mana efek yang dihasilkan yakni berupa efek positif. Hasil riset penelitian ini memberikan dukungan pada riset yang dilakukan oleh (Lianto & Purnamasari, 2021), dimana riset yang dihasilkan menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* secara parsial dipengaruhi oleh *whistleblowing system* dan pengaruh yang diberikan tersebut secara positif dan juga signifikan.
3. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memberikan efek positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil dari penelitian ini memberikan dukungan terhadap penelitian oleh Mersa, Sailawati, dan Malini (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan SPIP

memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Tindakan kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisir serta dapat dicegah dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik (Francesco & Hastuti, 2022).

4. Kompetensi auditor internal, *whistleblowing system*, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara parsial dan secara bersama-sama (simultan) terhadap pencegahan *fraud*.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah terlaksana dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian riset ini tentu tidak luput dari suatu keterbatasan, yang mana keterbatasan dalam penelitian ini yakni:

1. Faktor-faktor yang memberikan efek terhadap pencegahan *fraud* pada inspektorat daerah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal yang dalam riset yang dilakukan oleh peneliti ini hanya terdiri dari variabel kompetensi auditor internal, *whistleblowing system*, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan masih terdapat faktor lain yang mampu memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
2. Adanya keterbatasan dengan menggunakan kuesioner yakni adakalanya responden tidak memberikan jawaban yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dan juga penggunaan waktu dalam penelitian ini yang sangat terbatas.

3. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada inspektorat dua daerah saja, yakni Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Padahal masih ada banyak daerah yang perlu diteliti

C. Saran

Terdapat saran yang perlu penulis sampaikan setelah adanya penelitian yang dilakukan, uraian serta simpulan yang didapatkan. Saran tersebut yakni:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat diperluas lingkup penelitiannya, tidak hanya inspektorat di dua daerah, melainkan melingkupi se-karesidenan Pekalongan.
2. Jika dilihat dari uji R^2 , dalam penelitian ini hanya 49,6% yang memberikan efek terhadap pencegahan *fraud*, maka saran untuk riset selanjutnya agar dalam penggunaan variabel, diharapkan untuk dapat menggunakan variabel lain yang belum digunakan pada penelitian ini atau bisa dengan menambah variabel yang lebih dapat memberikan efek terhadap pencegahan *fraud*.

D. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait kompetensi auditor internal, *whistleblowing system*, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan *fraud*. Semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap pencegahan *fraud*. penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung khazanah keilmuan mengenai *theory of planned behavior* dan *fraud hexagon* yang berhubungan dengan ruang lingkup inspektorat.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa implikasi praktis bagi inspektorat daerah dalam meningkatkan upaya pencegahan kecurangan. Bagi inspektorat yang berperan dalam pencegahan kecurangan, terutama auditor, Hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan evaluasi untuk meminimalkan tingkat kecurangan atau *fraud* yang terjadi di dalam sektor pemerintahan. Selain itu bagi para pegawai pemerintah dapat melaksanakan dan meningkatkan kinerjanya secara efektif dan efisien dan jujur dalam pekerjaan dan melaksanakan tanggungjawab kepada pimpinan, masyarakat serta pihak-pihak terkait. Untuk meningkatkan kinerja pegawai terutama auditor, perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu auditor dan para pegawai pemerintah diberikan sosialisasi serta pembinaan terkait

pentingnya mencegah dan menolak perbuatan *fraud*. Tidak hanya itu, sistem layanan pengaduan yang telah diterapkan juga semestinya dijalankan dengan maksimal agar pengaduan mengenai tindak kecurangan dapat terselesaikan secara tuntas, tentu dengan didukung dengan sistem pengendalian yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. (2014). *Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia*. 1–16.
- ACFE. (2018). *[investigate] Sewindu ACFE Indonesia*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019*.
- Ajzen, I. (2014). *The theory of planned behavior*. January 2012.
<https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
<https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Amelia, R. W., & Sulistyowatie, S. L. (2022). Analisis Theory of Planned Behavior Terhadap Niat Berwirausaha Mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten. *Akuntansi*, 14(1), 35–44.
- Asmara, W. W. (2021). Optimalisasi Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) : Meneladani Sifat Rasulullah SAW. *Ekuitas : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 6(2), 271–291.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5233>
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). (2021). *Peraturan Nomor: PER.01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. 2.
- Athar, H. S. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kedisiplinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.5, No 1, February 2020: 57-64 P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165*.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160–169.
- Azizah, N., & Erinos. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Asimetri Informasi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(4), 674–685.
- BPK RI. (2017). *Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017 tentang Standar*

Pemeriksaan Keuangan Negara.

- brebeskab.go.id. (2023). *No Title*.
<https://inspektorat.brebeskab.go.id/profile/tupoksi/>
- Data Primer yang Telah Diolah. (2023). *Data Primer yang Telah Diolah*.
- detikJateng. (2022). *Mantan Kepala Dindikpora Brebes Dilaporkan ke Kejari, Ini Dugaannya*. https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6004599/mantan-kepala-dindikpora-brebes-dilaporkan-ke-kejari-ini-dugaannya/amp#aoh=16792905366310&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s
- DetikJateng. (2023). *Brebes Dijuluki Sundanya Jawa, 7 Kecamatan Berbahasa Sunda*. <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6552442/brebes-dijuluki-sundanya-jawa-7-kecamatan-berbahasa-sunda#:~:text=Brebes>
- DPRD Kota Tegal. (2022). *Kejar Perkembangan Kasus CSR PDAM, Gabungan Aktivist Datangi Kejari*.
<https://dprd.tegalkota.go.id/contents/detail?aWRfZGF0YT04NjIw>
- Ekaputra, A., Triyono, & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Ekombis Review- Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 198–206.
- Etika, C., Ermawati, L., & Bustami, J. (2022). Analisis Pengaruh Independensi Auditor dan Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 17–28.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan The Effect of E-Procurement Implementation and Government Internal Control System against Fraud Prevention of Government Procurement of Goods. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243.
- Gede, P., Putra, S., & Diatmika, I. P. G. (2022). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Whistleblowing System , dan Bystander Effect terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana BUMDes (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klungkung)*. 12(2), 404–412.
- Harfiansyah, A., & Ghofar, A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Integritas Terhadap Kecurangan Akuntansi Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).

- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System , Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731–745. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i03.p16>
- Indriani, A. (2021). Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Financial and Tax*, 1(2), 70–85.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Peran Internal Audit , dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(71), 337–348.
- Irmayanti, Lewangka, O., & Mardjuni, S. (2021). Pengaruh Etika Profesi, Kompetensi dan Kerja Sama Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Kualitas Laporan Hasil Pengawasan pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 114–121. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1185>
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117–1131.
- Kabupaten Brebes. (2010). Gambaran Umum Kondisi Dan Potensi Wilayah Kab. Brebes. *Kegiatan Penyusunan Review RPIM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Brebes*, 1–41.
- Kabupaten Brebes. (2022). *LKjIP*.
- Kharie, S. M., & Bereki, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Auditor Internal dan Keadilan Organisasional Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3666984>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing System - WBS)*. www.governance-indonesia.com
- Kota Tegal. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*.
- KPK. (2022). *Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi*. aclc.kpk.go.id
- Kumaat, V. G. (2010). *Internal Audit* (S. Saat (ed.)). Erlangga.
- Kusumosari, L. (2020). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Fraud Hexagon Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. *Universitas Negeri Semarang*, 1–243.

- Ladewi, Y., Nurhayati, N., Bandung, U. I., & Janatul, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 21(1), 99–107.
- Lianto, T. W., & Purnamasari, P. (2021). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 42–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.188>
- Machali, I. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib (ed.); 1st ed.). Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mangasih, E. T., Pinasti, M., & Bawono, I. R. (2020). The Effect of Quality of Internal Audit and Effectiveness of Internal Control Systems on Good Corporate Governance in Finance Companies. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 05(01), 56–82.
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 313–324.
- Menteri Negara. (2008). *Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.
- Mersa, N. A., Sailawati, & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 85–92.
- Muslimin, R., Hadi, E. D., AB, S. A., & S.U. (2020). Pengaruh Pengalaman, Tekanan Beban Kerja, dan Tekanan Waktu Audit Terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud Bagi APIP Inspektorat Provinsi Bengkulu. *Magister Manajemen, Universitas Bengkulu*, 1, 540–558.
- Nurfadillah, Y., Mustika, R., & Yentifa, A. (2022). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat). *JABEI*, 2(1), 18–22.
- Oktariswan, D., & Yuliyanti, R. (2020). Peran Kualitas Audit Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Star. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 93, 1–10.
- Peuranda, J. H., Hasan, A., & Silfi, A. (2019). Pengaruh Independensi , Kompetensi dan Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pelatihan Audit Kecurangan sebagai

- Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi FEB Universitas Riau*, 27(1), 1–13.
- Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 115. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.32335>
- Prastowo, A. (2014). *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis* (M. Sandra (ed.); III). Ar-Ruzz Media.
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis olah Data Menggunakan SPSS* (R. I. Utami (ed.)). Penerbit ANDI.
- Rahmanda, F., & Yuniarti, R. (2019). Pendeteksian Kecurangan (Fraud) yang Dipengaruhi Oleh Independensi dan Kompetensi Auditor Internal. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 22–37.
- RI. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- RI. (2016). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017*.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Edisi Dua). Suluh Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (ke-26). Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS* (Mona (ed.); Edisi Leng). Penerbit Pustaka Baru Press.
- Suleman, N., K, M., Thalib, & Anwar, R. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moralitas Individu terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12).
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto, H. (2019). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1570. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p27>

- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2018). Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>
- Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect, Whistleblowing System, Internal Locus of Control Dan Kompetensi Aparatur Dalam Pencegahan Fraud Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29–39. <https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1993>
- Wicaksono, I. (2019). *Analisis Peran Inspektorat Utama Dalam Pencegahan Fraud (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)*.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.
- Wintari, N. M., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. A. P. G. B. A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi, Pengalaman Kerja, Kompleksitas Tugas dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Bali. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 126–135.
- www.tegalkota.go.id. (2014). *Kondisi Geografis*. https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4:kondisi-geografis&catid=9&Itemid=276&lang=id
- www.tegalkota.go.id. (2019). *Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota 2019*. https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=272&lang=id
- www.tegalkota.go.id. (2023). *Kota Tegal Dideklarasikan Sebagai Kota Lengkap ke-4 Se-Indonesia*. https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=7115:kota-tegal-dideklarasikan-sebagai-kota-lengkap-ke-4-se-indonesia&catid=20:berita&Itemid=252&lang=id
- Zainal Abidin, T. (2020). Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2323>
- Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2021). *Audit Internal Konsep dan Praktik* (kelima). Gadjah Mada University Press.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Siti Zulfa
2. Tempat tanggal lahir : Bogor, 26 November 2000
3. Alamat : Dk. Permas Kulon 04/02 No. 60, Ds. Pagumenganmas, Kec. Karangdadap, Pekalongan, Jawa Tengah 51174
4. Nomor handphone : 081210079462
5. Email : sitizulfa69@gmail.com
6. Nama ayah : Sobirin
7. Pekerjaan ayah : Buruh penjahit
8. Nama ibu : Mulyanah
9. Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

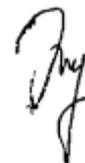
B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N Pagumenganmas (2006-2012)
2. SMP : SMP N 01 Karangdadap (2012-2015)
3. SMA : SMK Muhammadiyah Kedungwuni (2015-2018) jurusan Akuntansi

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Bidikmisi tahun 2019
2. HMJ Akuntansi Syariah sebagai Bendahara II (2019-2020)
3. Anggota Divisi Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Tax Center IAIN Pekalongan (2021-2022)

Penulis



Siti Zulfa